

IWAN SETIAWAN

Dinamika Pemberdayaan Petani

Sebuah Refleksi dan Generalisasi
Kasus di Jawa Barat

Prakata:

Prof. Dr. Sumardjo, MS

**Guru Besar Penyuluhan Pembangunan IPB dan
Ketua Komisi Penyuluh Pertanian Indonesia**

AN DIGITAL

ALTENG

Palangka Raya

24

vidya

630.92 59824
SET
d

IWAN SETIAWAN

DINAMIKA PEMBERDAYAAN PETANI:

Sebuah Refleksi dan Generalisasi Kasus di Jawa Barat

Prakata:

Prof. Dr. Sumardjo, MS

Guru Besar Penyuluhan Pembangunan IPB dan Ketua Komisi Penyuluh
Pertanian Indonesia

No. Induk	34/D/B/2012
Tgl. Terima	18/07/2012
Beli/Hadiah/Sumbangan	B
Nomor Buku	
Copy Ke	



ISBN: 978-602-8323-75-8

DINAMIKA PEMBERDAYAAN PETANI: Sebuah Refleksi dan Generalisasi Kasus di Jawa Barat

© 2012 IWAN SETIAWAN

Hak cipta yang dilindungi ada pada penulis
Hak penerbitan ada pada Widya Padjadjaran

Cetakan Pertama, Januari 2012

Penulis : IWAN SETIAWAN

Penata letak : Mien AZ

Desain Cover : Mien AZ

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pasal 2

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PRAKATA

Petani, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, meski dilabel sebagai pelaku ekonomi paling tua (*classic*) di dunia, namun dalam rentang peradaban senantiasa fenomenal dan hangat (*up to date*) untuk didiskusikan. Tentu bukan hanya berkaitan dengan ragam urusan rumah tangga dan usahatani yang semakin rumit dan terhimpit, tetapi terkait juga dengan area-area yang lebih strategis (bahkan politis), menyangkut masa depan pangan, kemandirian energi, kelestarian lingkungan, penciptaan lapangan kerja dan usaha, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengembangan industri berkelanjutan, stabilitas ekonomi-politik dan posisi tawar dalam perdagangan yang semakin terbuka (*free trade*).

Paradoks dengan besaran jumlah dan posisi strategisnya, dalam realitas kekinian, meski tidak sedikit petani yang hidup sejahtera, namun secara umum kinerja sebagian besar petani justru semakin melemah. Hal ini terjadi karena secara sosial, ekonomi dan politik, petani ternyata semakin termarginalkan, baik oleh penentu kebijakan, pelaku usaha, masyarakat konsumen, generasi muda bahkan dari perilaku rumah tangga petani itu sendiri. Akibatnya, petani bukan saja rata-rata usianya semakin tua, rata-rata berpendidikan rendah dan sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi juga kehilangan dan ditinggal oleh generasi muda (*lost generation*). Ironinya, alih-alih hidup berkecukupan, rumah tangga petani justru menjadi mayoritas pengonsumsi beras miskin (Raskin).

Kecenderungannya, nasib para petani yang sudah lemah secara internal, semakin termarginalkan oleh beragam kepentingan pihak dan sektor di luar pertanian. Bahkan, petani semakin tidak berdaya ketika harus berhadapan dengan struktur pasar yang kian bebas dan keberpihakan pemerintahan yang kian melemah. Nasib petani juga semakin tak menentu ketika menghadapi implikasi-implikasi isu perubahan iklim yang begitu menggema. Dari pemerintah daerah dan sektor terkait, para petani juga kurang mendapat pemihakan, antara lain ditandai dengan longgarnya kran impor dan membanjirnya produk pertanian impor, tingginya konversi lahan, minimnya anggaran pertanian dan sebagainya. Ketidakpedulian konsumen juga telah menjadi ancaman yang nyata bagi para petani. Idealnya, permasalahan yang dihadapi oleh para petani dapat diselesaikan secara bersama dengan penyuluh dan peneliti. Namun apa daya, nasib kelembagaan dan keadaan sumberdaya kedua lembaga tersebut pun tidak jauh berbeda dengan petani, tidak mendapat porsi perhatian yang memadai, terutama di era otonomi daerah.

Fenomena menguatnya ancaman yang dialami para petani dan kelembagaan pendukungnya umum terjadi di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat yang selama ini menjadi jendela (*show window*) pertanian Indonesia dan penyangga pangan nasional. Jawa Barat merupakan provinsi yang secara sosial-spasial memiliki zona ekologi, komoditas, budaya tani, kelembagaan dan karakteristik petani yang khas dan bervariasi. Provinsi yang secara historis empiris menjadi titik awal pengembangan agribisnis di Indonesia. Provinsi yang menjadi basis dan tempat lahirnya pionir-pionir lembaga-lembaga riset, lembaga pendidikan tinggi pertanian,

perusahaan-perusahaan agribisnis dan agroindustri, serta menjadi yang tersubur dalam pertumbuhan pasar-pasar induk dan ritel-ritel modern.

Ironis, meski telah dilakukan berbagai upaya “pembinaan”, “pemodernan” dan belakangan ini “pemberdayaan”, namun secara umum petani di Jawa Barat masih menampilkan kinerja kemandirian yang relatif rendah, terutama pada aspek perilaku daya saing (*competitiveness*). Secara riil, antara lapisan petani masih terdapat kesenjangan tingkat kemandirian yang signifikan, terutama di zona selatan dan tengah Jawa Barat. Benar bahwa petani lapisan atas telah memiliki wawasan kemodernan dan keefisienan yang cukup baik, namun belum ditunjang dengan sikap dan keterampilan yang sejalan dengan itu, sehingga perilaku daya saingnya tetap lemah. Tentu saja kelemahan petani tersebut terkait erat dengan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhinya.

Membaca buku **“Dinamika Pemberdayaan Petani: Refleksi dan Generalisasi Kasus di Jawa Barat”** yang ditulis oleh saudara Iwan Setiawan, menguatkan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa pemberdayaan petani, sekalipun dilakukan di daerah yang dianggap maju dan modern pertaniannya, ternyata semakin disadari bahwa implementasinya tetap harus disikapi secara cermat, dinamis, kritis, terus menerus, terintegrasi dan berkelanjutan. Artinya, tidak boleh ada kata puas dan berhenti melakukan pemberdayaan. Ketika satu tahap tujuan pemberdayaan terwujud, maka dinamika pemberdayaan akan segera berlanjut ke tujuan selanjutnya. Proposisinya, semakin modern suatu masyarakat, semakin cepat kemajuan ilmu pengetahuan, semakin pesat pembangunan, dan semakin cepat perubahan sosial, maka semakin besar pula tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh para petani. Demikian juga tantangan dan ancaman dari perubahan mekanisme pasar yang semakin terbuka, teknologi yang semakin canggih dan laju perubahan iklim global yang kian abnormal.

Melalui opini-opini kritis, tulisan-tulisan hasil penelitian dan pengalaman lapangan yang terangkai dalam buku ini, saudara Iwan Setiawan berusaha menganalisis dan menjelaskan secara general kondisi eksisting petani, kelembagaan petani (termasuk gender), akses petani dan berbagai hal yang terkait dengan upaya, permasalahan dan pemberdayaan petani, khususnya di Jawa Barat. Dalam refleksi dan generalisasinya, saudara Iwan Setiawan mencoba melihat secara objektif dan proporsional sisi-sisi kelebihan dan kekurangan dari kondisi yang ada dan berbagai upaya yang telah diterap gunakan di Jawa Barat. Secara substansial, penulis tidak hanya mengungkap fakta realitas petani dan program-program pemberdayaan yang telah diterapkan, tetapi juga menawarkan solusi-solusi alternatif bagi penguatan sisi-sisi kelemahan program pemberdayaan dan sisi-sisi ketidakberdayaan petani yang selama ini terabaikan.

Perspektif penulis memandang bahwa melakukan analisis terhadap petani pada hakekatnya melakukan analisis terhadap sistem pertanian secara keseluruhan, baik dalam ruang pedesaan maupun ruang pinggiran kota dan perkotaan. Dikatakan demikian karena petani sangat lekat dengan lahan, dengan air, dengan iklim, dengan kelembagaan pendukung, dengan pasar, dengan politik, dengan kebijakan, dengan industri dan dengan konsumen. Bahkan secara kelembagaan, penulis telah bersikap

bawa menganalisis petani berarti menganalisis sosial budaya, lembaga, pengetahuan dan teknologi lokal, gender, modal sosial, modal alami, modal ekonomi, modal hayati dan aspek-aspek pedesaan lainnya. Buku ini juga mengungkap fakta dan menganalisis masyarakat konsumen dan pelaku-pelaku pertanian terkait yang berada di pinggiran kota dan perkotaan.

Meskipun substansi buku ini lebih merefleksi dan menggeneralisasi kasus-kasus di Jawa Barat, namun tetap menarik untuk dibaca oleh pegiat, pemerhati dan peminat pembangunan pertanian di wilayah lainnya. Secara praktis maupun teoretis, buku ini juga dapat menjadi bahan bacaan, acuan dan pelajaran bagi para mahasiswa, peneliti, praktisi dan penentu kebijakan yang akan melakukan penelitian, pengabdian maupun pemberdayaan petani dan masyarakat pedesaan pada umumnya. Bahkan, diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah lain dalam melakukan pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani. Minimal menyangkut gagasan-gagasan dan fakta-fakta yang terkait dengan aspek-aspek pemberdayaan petani dan masyarakat pedesaan yang banyak disinggung dalam substansi buku ini.

Kepada saudara Iwan Setiawan yang telah mampu menyelesaikan naskah buku ini saya menyampaikan apresiasi yang tinggi. Buku ini sepatutnya dinilai sebagai produk berharga dari penulis yang dapat memberi manfaat bagi semua pihak dan generasi-generasi yang peduli terhadap nasib petani dan upaya-upaya optimalisasi pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan petani.

Bogor, Januari 2012

Prof. Dr. Sumardjo

**Guru Besar Penyuluhan Pembangunan IPB
dan Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional Indonesia**

KATA PENGANTAR

...sebelum era feodalisme dan kapitalisme, para petani Nusantara hidup sejahtera dalam masyarakat yang berbhineka tunggal ika, berasas *primes inter pares* dan berbudaya *potlatch*, yakni budaya memberi lebih baik daripada menerima (tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah)...

--Heroe Soeparto--

Segala puji bagi Allah SWT yang melebihi beberapa derajat orang-orang yang berilmu di jagat raya ini. Sebagai mahluknya, penulis bukan saja senantiasa berdo'a kepada-Nya agar dapat digolongkan kedalam orang-orang yang berilmu dan berpikir, tetapi juga berusaha untuk belajar mewujudkannya, sekecil apapun. Salah satunya adalah dengan memikirkan dan menawarkan solusi-solusi alternatif atas beragam persoalan yang menghantui petani dan masyarakat pedesaan (khususnya di Jawa Barat), yang oleh penulis dikemas dalam buku yang bertajuk "Dinamika Pemberdayaan Petani" ini. Jujur saja, semula tulisan ini hanya merupakan kumpulan opini-opini, teori-teori, isu-isu, kasus-kasus, hasil diskusi, hasil penelitian dan pengalaman-pengalaman praktis penulis dalam pemberdayaan masyarakat berbagai sektor (terutama masyarakat pedesaan) di Jawa Barat. Namun, berdasarkan analisis kritis dari berbagai diskusi partisipatif, terungkap banyak dan beragamnya bentuk dan jenis penyimpangan terhadap paradigma, konsep, aplikasi dan keberlanjutan pemberdayaan, tak terkecuali dalam pemberdayaan petani. Bahkan, analisis lebih tajam dari kajian dan diskusi penulis dengan beragam pelaku, praktisi dan pakar pemberdayaan mengidentifikasi adanya friksi dan upaya penyimpangan (kriminalisasi atau penyesatan) terhadap kaldah, konsepsi dan praktik pemberdayaan. Akibatnya, di lapangan berkembang gejala anomali berupa kenyataan "semakin banyak program pemberdayaan petani, maka semakin tidak berdaya para petani". Sungguh sebuah ironi, ketergantungan petani dan masyarakat tumbuh subur ditengah gemuknya intensitas dan kuantitas program pemberdayaan. Ada apa dengan pemberdayaan?

Jawabannya, apalagi kalau bukan adanya kriminalisasi. Dikatakan kriminalisasi atau penyesatan, karena hakekat pemberdayaan telah secara terencana (konspirasi) dipelintir dari proses pemungkinan (*enabling*), penguatan (*strengthening*) dan perlindungan (*protecting and advocating*) nilai-nilai keberdayaan yang positif, produktif, konstruktif dan berkelanjutan, ke arah nilai-nilai (modal sosial) keberdayaan negatif. Mengadaptasi konsepsi modal sosial negatif dari Robert Putnam dan Bourdieu, nilai-nilai keberdayaan negatif tersebut berwujud perilaku menyimpang, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Perilaku menyimpang telah menyesatkan arah pikir dan praktik pemberdayaan masyarakat (termasuk petani) ke ranah rekayasa sosial (*social engineering*) dan pembangunan pragmatis (*trickle down effect*).

Seperti kebanyakan pemerhati, peminat atau publik pemberdayaan, penulis pada mulanya memandang secara generik semua itu sebagai rona dari dinamika paradigma pemberdayaan. Tetapi setelah ditelaah lebih dalam muncul kekhawatiran, jika keadaan penyimpangan, pemangkasan, pengerdilan, pembiasan, kriminalisasi, dan penyehatan pemberdayaan terus dibiarkan, sama saja dengan membuka peluang bagi terjadinya sesat pikir dan kegagalan pemberdayaan, baik oleh residual rekayasa sosial (*status-quo*) dalam tubuh birokrasi maupun konspirasi politik, hegemoni korporasi dan patologi sosial. Jika demikian, pertanyaannya kemudian, lantas akan seperti apa masa depan nasib kaum tani, kaum miskin, kaum pinggiran atau kaum marginal yang lemah tak berdaya? Lantas, bagaimana dengan masa depan dan keberlanjutan beribu aksi pemberdayaan yang sedang dan akan digulirkan?

Membiarkan aksi-aksi dan program-program pemberdayaan berjalan atau dieksekusi secara liar dalam kondisi terkontaminasi perilaku menyimpang jelas bukan jawaban, begitu juga menihilkan program. Membingkai atau mengisolir pemberdayaan, sah-sah saja dilakukan, tetapi bukan pekerjaan semudah membalik telapak tangan. Apalagi faktanya entitas pemberdayaan eksis dalam ruang-ruang publik dan bersanding dengan ragam paradigma pembangunan. Oleh karena itu, sebelum kontinum kesenjangan terbentang, tenggelam lebih dalam atau runtuh seluruh bangunan pemberdayaan, masih ada kesempatan untuk mencari resep (*prescription*) bagi memperbaiki, merajut dan mentautkan kembali paradigma dan aksi-aksi pemberdayaan. Gagasan besar dari semua itu, oleh penulis diberi label "mendinamiskan pemberdayaan".

Tidak dimungkiri bahwa selama ini ada banyak program pemberdayaan yang berdasarkan pemetaan outcome (*outcome mapping*) berdampak nyata terhadap keberdayaan masyarakat lemah, namun tidak dimungkiri pula bahwa sebagian besar justru berakhir dengan ketidakjelasan. Seperti sebuah skenario (jika tidak dikatakan dendam pencacian nilai), berbagai jebakan untuk mebiaskan dan merekayasa paradigma, kaidah, prinsip dan keberlanjutan konsep dan implementasi pemberdayaan oleh paradigma pembangunan lama (*status-quo*) yang sosialis maupun kapitalis terus digulirkan. Pergerakannya bagai bola salju dan membesar bersama upaya reformulasi, redefinisi dan reinovasi terhadap berbagai sisi dan substansi pemberdayaan. Secara historis-empiris, sepintas menampilkan optimisme sebagai upaya berlanjut yang didorong ragam perbaikan kearah pembentukan neo-pemberdayaan. Namun ironis, berbagai bentuk penyimpangan dan krisis persepsi justru semakin kentara, menguat dan membesar seiring dengan dilembagakannya pemberdayaan.

Memang, pemberdayaan bukan akhir dari segala paradigma dan konsep untuk memecahkan persoalan ketimpangan relasi-kuasa, tetapi berbagai bentuk distorsi pada pelembagaan pemberdayaan bukan terjadi karena faktor tidak mujarab dan tidak generiknya konsep pemberdayaan, melainkan faktor doktrinisasi dan kolonisasi atas metodologi pemberdayaan oleh hegemoni kapitalisme. Faktor kausal utamanya adalah kriminalisasi konsepsi dan implementasi pemberdayaan oleh agen-agen kapitalisme yang eksis dalam ruang korporasi, birokrasi, akademik, politik dan publik. Beragam kontaminasi sesat pikir dijejalkan kedalam pemberdayaan, baik

melalui program-program, birokrasi, ruang-ruang akademik, lembaga swadaya, perusahaan-perusahaan, buku-buku, gagasan-gagasan dalam seminar-seminar, penyuluhan-penyuluhan maupun pembentuk opini, media massa dan elektronik.

Fenomena pembiasaan, pengerdilan dan penyimpangan pada konsepsi dan aplikasi pemberdayaan mirip seperti pada kasus pembiasaan penyuluhan pertanian dan pengembangan masyarakat (*community development*) sesaat setelah kolonialisasi. Meskipun sesat pikir dan penyimpangan itu terdeteksi namun sulit direduksi, ada sebagai warna dinamika yang seringkali diklaim sebagai dialektika. Kalaupun dipaksakan, dipilah agar terpisah, alih-alih menihilkan, yang terjadi malah semakin terjebak dalam perangkat konspirasi hingga memperdalam pembiasaan konsepsi dan metodologi. Bahkan, bisa lebih parah jika para pelaku dan subjek pemberdayaan belum memiliki kerangka dan pijakan berpikir yang stabil. Perlawanan, sekalipun dilakukan secara radikal, tetap bukan solusi. Jawabannya, agar terjadi restorasi, maka pemberdayaan perlu direkonstruksi.

Rekonstruksi menjadi pilihan karena pemberdayaan masih menyisakan potensi sejati, yakni identitas pemberdayaan. Memang teridentifikasi konsepsi yang lebih humanis dari rekonstruksi, yakni transformasi. Namun, mengingat pemberdayaan sendiri merupakan bentuk (produk) transformasi, maka membangun kembali pemberdayaan jauh lebih ideal. Secara normatif, rekonstruksi bukan sekedar membangun kembali sisi fisik pemberdayaan, tetapi meliputi institusi, filosofi dan pilar-pilar pikir yang goyang maupun yang tumbang. Oleh karena itu, rekonstruksi dapat dimaknai upaya menguatkan atau memberdayakan kembali pemberdayaan. Jika meminjam istilah pilar pemberdayaan, lebih tepat jika disebut menguatkan kembali (*strengthening*) dan melindungi pemberdayaan (*protecting*).

Sebagai pijakan, tindakan sosial rekonstruksi diupayakan menyeluruh (holistik dan sistemik) secara metodologi, agar upaya tidak terjebak kembali kedalam epistemologi reduksionis positivistik, atau produknya (*social engineering*). Sekalipun dalam tulisan ini disajikan contoh-contoh kasus, isu-isu, praktik-praktik dan hasil penelitian penyimpangan pemberdayaan, itu hanya sekedar ilustrasi kasus penyimpangan filosofis dan aksi pemberdayaan, bukan dimaksudkan untuk kembali menggiring persepsi dan perspektif para pembaca kedalam ranah dan idiologi penyimpangan.

Sejatinya, epistemologi pemberdayaan yang holistik tidaklah bersifat kaku, tetapi dirancang sedemikian rupa positif bagi pengayaan inovasi dan kreativitas penguatan pemberdayaan. Tentu saja fleksibilitas yang tinggi dari epistemologi pemberdayaan tidak dibiarkan liar, tetapi dipandu secara metodologis dengan kerangka berpikir atau model mental pemberdayaan yang bersifat dinamis dan sistemik. Selain itu, untuk memandu mempermudah pemahaman para pembaca (tanpa bermaksud membelenggu kebebasan analisisnya), sistematika penulisan disusun secara terpadu antara konsepsi pemberdayaan yang bersifat teoretis dengan perspektif praxis dan pragmatis (*best and fit practices*).

Sebagai bangsa besar yang mewarisi keragaman sumber daya, kelembagaan, modal sosial (*social capital*), kearifan (pengetahuan dan teknologi) lokal (*local knowledge*) dan pemberdayaan lokal (*local empowerment*) yang secara teologis,

sosiologis maupun ekologis sudah memiliki nafas dan kaidah sebagaimana dibentangkan dalam paradigma pemberdayaan, sangat penting untuk bukan hanya sekedar disandingkan tetapi dijadikan sebagai substansi, kerangka dan formulasi rekonstruksi pemberdayaan. Tentu saja, diupayakan untuk tidak mempersoalkan keberagamannya, tetapi mencari inti (*core*) persamaannya yang bukan bermakna menyeragamkan. Terpenting, bagaimana kita mampu memadukan (*mixing*), mengadaptasikan dan menginternalisasikan ragam pemberdayaan, baik yang berbasis kemodernan (*techno-empowerment*), berbasis sosio-budaya etnis (*ethno-empowerment*), berbasis agama (*theos-empowerment*) dan berbasis lingkungan (*eco-empowerment*).

Menjembatani keragaman pemahaman bagi rekonstruksi pemberdayaan jelas membutuhkan formulasi dan metodologi yang tidak saja akomodatif, tetapi juga sistemik. Proposisinya, pemberdayaan bukan skenario terpisah atau upaya parsial, tetapi menuntut keharusan untuk dilakukan secara menyeluruh dalam kesatuan (*entity*) episodic. Pemberdayaan tidak dapat dilakukan secara bagian per bagian, tetapi mengandaikan satu kesatuan (*system*). Baik proses maupun masalahnya, sejatinya tidak dapat dimengerti secara bagian per bagian, karena meminjam istilah Fritjof Capra (2002), proses-proses dan masalah-masalah dalam kehidupan ini bersifat sistemik, artinya bahwa semuanya saling terkait dan tergantung satu sama lain, termasuk dalam pemberdayaan. Artinya, pemberdayaan masyarakat hanya mungkin terwujud apabila semua kesatuan sistem juga berdaya. Pemberdayaan juga bukan merupakan sekuen dari pembangunan. Meski ada rasionalisasi dan prioritas, tetapi implementasinya mengandaikan kesejajaran (*simultan*).

Oleh karena itu, kerangka berpikir rekonstruksi pemberdayaan secara skematis dibingkai dengan model mental dan berpikir metodologi sistem, yakni sistem pemberdayaan. Adopsi metodologi sistem dinamis diyakini efektif bagi rekonstruksi pemberdayaan, karena setiap dinamika akan senantiasa terkoreksi, sehingga kecil kemungkinan untuk terjebak dalam "adaptasi negatif". Koreksi terhadap gerak dinamis sangat penting dalam rekonstruksi pemberdayaan, karena secara teoretis maupun praktis, sebagai ilmu sosial, pemberdayaan yang memiliki fleksibilitas tinggi sangat rentan terhadap ragam kontaminasi dari pemikiran reduksionis (*deviant thinking*) dan batasan-batasan semu (baca: dana dan operasi proyek) pembangunan.

Merekonstruksi praktik pemberdayaan secara sistemik dengan mengintegrasikan dua pasang perspektif (teoretis kritis dan praktis) dan menyandingkan dua pasang substansi formulasi (*open* dan *local content*) tentu tidak gampang. Apalagi, logika rekonstruksi bukan dimaksudkan memaksa mendiaspora (memisahkan pemberdayaan dari induknya). Proses dan sistematikanya dikonstruksi melalui jalan panjang analisis dan sintesis kritis, diskusi partisipatif, kajian mendalam dan pengalaman aksi pemberdayaan. Masukan-masukan dari berbagai sumber yang telah berpengalaman merepresentasi dan menganalisis secara kritis implementasi pemberdayaan, yang kemudian diseleksi (*selecting coding*) dan dipetakan sesuai benang merah (*axial and mapping coding*) metodologi rekonstruksi, sangatlah berharga. Oleh karena itu, menjadi penghormatan bagi kami untuk diucapkan terima

kasih kepada semua pihak yang masih peduli dan memiliki identitas bagi upaya memanusiakan manusia (*humanisme*) yang lemah tidak berdaya (*the powerless*).

Buku *Dinamika Pemberdayaan Petani* yang ada ditangan pembaca, sejatinya tidak lebih dari sekedar produk itikad baik dari penulis. Seperti beragamnya orang memandang paradigma dan proses pemberdayaan, penulis pun menyadari akan keberagaman pandangan terhadap tulisan ini. Oleh karena itu, optimisme penulis tidak lantas membuat sempit dan liniernya pandangan, apalagi menutup mata. Kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca merupakan wujud penghargaan yang mudah-mudahan dapat mempertajam pemikiran dan analisis penulis. Terlepas dari semua itu, pada prinsipnya, memulai untuk berkreasi dan berbuat produktif, jauh lebih baik daripada pasif, selama tidak dilaksanakan secara asal-asalan. Sekalipun buku ini masih diliputi kekurangan di sana sini, namun penulis patut untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam terbitnya buku ini. Pertama, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Dr. Sumardjo, guru saya yang juga pakar penyuluhan pembangunan Fakultas Ekologi Manusia dan Pascasarjana IPB yang telah berkenan memberikan Prakta pada buku ini. Kedua, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Kang Ganjar Kurnia yang dengan caranya sendiri banyak mengkritisi, memotivasi dan mengingatkan saya untuk senantiasa "ajek", kritis dan mengedepankan aspek manfaat dalam berpikir dan menawarkan gagasan-gagasan alternatif.

Ketiga, ucapkan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh redaktur *Harian Umum Pikiran Rakyat* yang telah mempublikasikan tulisan-tulisan saya, terutama dalam rentang 1999-2010, begitu juga kepada seluruh redaktur *Harian Umum Tribun Jabar*, *Harian Umum Kompas* dan lainnya. Keempat, ucapkan terima kasih saya sampaikan kepada guru-guru dan kolega sejawat di SD, SMP, SMA, Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Unpad dan di Institut Pertanian Bogor. Kelima, saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua orangtuaku dan belahan-belahan jiwaku, Siska Rasiska, Taqsyia Komunika dan Gima Arinalhaq yang banyak memberi inspirasi dan terkorbankan waktu-waktu kebersamaannya. Terakhir, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Penerbit Widya Padjadjaran yang telah menjembatani buku saya untuk sampai ke tangan para pembaca. Akhir kata, semoga tulisan secuil ini dapat bermanfaat bagi pembaca, minimal membuka mata hati dan mata pikir dalam menyikapi keragaman persoalan pemberdayaan dan realitas kehidupan para petani, baik di Jawa Barat maupun di Indonesia. Amiin

Bandung, Januari 2012

Iwan Setiawan

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
A. PETANI: LABEL ATAU PROFESI	1
B REDEFINISI PETANI DAN BURUH TANI	8
B.1 Petani	8
B.2 Petani dan Buruh Tani	13
B.3 Petani: Sulit Menggapai Komersial.....	17
B.4 Jaminan Sosial Petani dan Buruh Tani	22
B.5 Rekonstruksi Nasib Buruh Tani	24
C. KARAKTERISTIK PRIBADI DAN USAHATANI PETANI	27
C.1 Karakteristik Petani Jabar Tengah	27
C.2 Karakteristik Petani Jabar Selatan	34
C.3 Karakteristik Petani Jabar Utara	38
C.4 Menyoal Premanisme Air	46
D. STATUS SOSIAL-EKONOMI PETANI	54
E. ORIENTASI DAN MOTIVASI PETANI	61
E.1 Orientasi Petani	61
E.2 Motivasi Petani	64
F. DINAMIKA AGRARIA PETANI	67
F.1 Struktur Agraria	67
F.2 Alih Fungsi Lahan	71
F.3 Pengendalian Alih Fungsi Lahan	74
F.4 Meksnisme Insentif dan Disinsentif	83
F.5 Mekanisme Formal Alternatif	97
G. DINAMIKA USAHATANI PETANI	102
G.1 Usahatani: Subsistensi dan Komersial	102
G.2 Membudayakan Padi Organik	106
G.3 Mengoptimalkan Lahan Tergenang	109
G.4 Masa Depan Lahan Usahatani	112
G.5 Menghemat Lahan Usahatani	117
H. PARTISIPASI DAN ADAPTASI PETANI	121
H.1 Partisipasi Petani	121
H.2 Adaptasi Petani Padi	126

I.	DINAMIKA GENDER PETANI	133
	I.1 Fakta Keterlibatan Wanita Tani	135
	I.2 Ketidakadilan Gender	137
	I.3 Transformasi Peran Wanita Tani	140
J.	DINAMIKA PEMUDA TANI	149
	J.1 Memberdayakan Pemuda Tani	149
	J.2 Bank Pemuda, Mungkinkah?	157
	J.3 Mudik: Re-Migrasi Pemuda	159
	J.4 Menyiasati <i>Brain Drain</i>	162
	J.5 Pemuda Kembali ke Desa	164
K.	DINAMIKA AGRIBISNIS PETANI	168
	K.1 Pembangunan Pedesaan Berbasis Agribisnis	168
	K.2 Involusi Agribisnis.....	174
	K.3 Advokasi Agribisnis	178
	K.4 Agribisnis: Dari VOC hingga TNCs.....	180
	K.5 Nasib Ironi BUMD Agribisnis	184
	K.6 Asuransi Agribisnis, Kenapa Tidak?	185
	K.7 Agroindustri Kreatif	189
L.	DINAMIKA PETANI PANGAN DAN PANGAN PETANI	194
	L.1 Gerakan Menabung Pangan	194
	L.2 Menonton Krisis Pangan Global	196
	L.3 Polusi Produk Pangan Dunia	200
	L.4 Pangan: Enak Memproduksi, Enak Mengonsumsi	205
M.	DINAMIKA KEARIFAN LOKAL PETANI	208
	M.1 Memaknai Hari Lingkungan Ala Masyarakat Adat	208
	M.2 Rekonstruksi Modal Sosial Masyarakat Pedesaan	210
	M.3 Membudayakan Melek Ekologi	212
	M.4 Erosi Budaya Padi	214
	M.5 Mentautkan Inovasi Lokal dan Global	217
	M.6 Mandulnya Pranata Mangsa	220
	M.7 Melindungi Kekayaan Hayati Jabar	222
	M.8 Tradisi Mudik dan Berkah Petani	223
	M.9 Nilai Tradisi <i>Ngabedahkeun</i>	225
N.	DINAMIKA POLITIK PERTANIAN PETANI	228
	N.1 Globalisasi dan Pertanian Indonesia	228
	N.2 Investasi Politik Pertanian	235
	N.3 Menyoal Kebijakan Pertanian Indonesia	238
	N.4 Monetisasi: Potensi Dibalik Subsidi	241
	N.5 Ke Mana Suara Petani	244
	N.6 Menyoal Politik Beras	247
	N.7 Melindungi Psikologis Petani	249
	N.8 Menyoal Politisasi Bencana	250

N.9	Mungkinkah Kredit Bunga Rendah Bagi Pelestarian Lingkungan	252
N.10	Mewaspadai Revolusi Iklim	254
N.11	Bandung: Butuh Modal Sosial	256
O.	DINAMIKA PERKEBUNAN PETANI	260
O.1	Revitalisasi Perkebunan	260
O.2	Petani Perkebunan, Berhematlah	264
O.3	Menyiasati Produksi Kopi Luwak	267
P.	DINAMIKA PEMBERDAYAAN PETANI	269
P.1	Pemberdayaan Petani	269
P.2	Jalan Terjal Kaum Miskin Pedesaan	279
P.3	Menyoal Pemberdayaan	282
P.4	Pemberdayaan Tanpa Hukum, Nihil	286
P.5	Techno-Empowerment	289
P.6	Ethno-Empowerment	291
P.7	Audit Pemberdayaan	293
P.8	Memberdayakan Masyarakat Jabar Selatan	297
P.9	Memberdayakan Keunggulan Lokal Masyarakat Jabar	299
P.10	Agropolitan, Sebuah Pemberdayaan	300
P.11	Transpolitan, Solusi Relokasi	301
P.12	Memberdayakan Masyarakat Desa Hutan	303
P.13	Menguatkan Citra Pertanian	305
Q.	DINAMIKA KELEMBAGAAN PETANI	307
Q.1	Potret Kelompok Tani	307
Q.2	Kelompok Sosial Petani	310
Q.3	Keterbukaan (Kekosmopolitan) Petani	312
Q.4	Kelembagaan Desa Peradaban	313
Q.5	Badan Usaha Milik Petani	316
R.	DINAMIKA KOMUNIKASI PETANI	319
R.1	Potret Komunikasi Petani	319
R.2	Perilaku Komunikasi Petani	322
R.3	Keefektifan Komunikasi Petani	328
R.4	Kompetensi dan Literasi Petani	330
R.5	Memberdayakan Komunikasi Petani	332
S.	TERIMA KASIH PETANI	340
	DAFTAR PUSTAKA	345

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Karakter Petani Berdasarkan Orientasi Usahatani Pada Berbagai Zona Agroekosistem di Jawa Barat	63
Tabel 2	Luas Lahan Beririgasi Menurut Jenis Pengairannya di Jawa Barat Tahun 2004-2007	72
Tabel 3	Kelompok Perangkat, Mekanisme dan Objek Insentif dan Disinsentif (ID) Pengendalian Alih Fungsi Lahan	94
Tabel 4.	Strategi Adaptasi Petani Padi Menghadapi Kelangkaan Buruh Tani	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Mekanisme Insentif dan Disinsentif Tidak Langsung (Hirarkhis) ..	96
Gambar 2.	Mekanisme Insentif dan Disinsentif Langsung	97